

**STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ATAS
KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANTONIUS DALA WUNU

2016210024

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2021

**Antonius Dala Wunu,
FISIPOL, 2021**

**Strategi pengembangan BumDes atas Kerjasama BUMS
Dosen Pembimbing I: Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.AP
Dosen Pembimbing II: Nanang Bagus, S.Sos., M.AP**

Email: antoniusdalawunu@gmail.com

RINGKASAN

BuMDes merupakan sumber daya pendapatan baru di area desa. Badan Usaha Milik Desa hadir juga menjadi lokasi untuk menjadi penggerak menjadi kekuatan setempa untuk menanbah kesejahteraan umum dan pendapatan di desa.

Dalam Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan agar mengetahui Dan memahami dalam menengelola BumDes Atas kerjasama PemDes dan Non governance dalam mengelola BumDes. Dalam Skripsi ini adalah penelitian jenis kajian pustaka. Dengan masukan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui data literasi (koran, majalah, dan dokumen), menganalisa dan mengelolah data dari penelitian sebelumnya. Hasil akhir penelitian menyimpulkan bahwa BumDes bagian dari peranannya masyarakat di desa secara Umum supaya tanpa memunculkan bentuk kegiatan yang dipengaruhi oleh komunitas tertentu di tingkat desa.

Dalam penerapan yang merupakna kesuatu terangkainya istilah yang dapat sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu aktivitas, leadership dan cara beraksi. termasuk dengan adanya *collaborative governance*, sebagai konsep dalam tata kelola pemerintahan sebagai proses memfasilitasi oleh berbagai institusi baik pemerintah, warga dan NGO. Ini mempunyai tujuan dalam memecahkan problem kolektif yang sulit diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

Kata Kunci: BumDes, Tata Kelola BUMDes, Implementasi Kerjasama, dan Pihak Swasta,
dan Kerjasama Pemerintah dalam mengembangkan BUMDes

BAB I

PendahuluaN

1.1. Latar Belakang

BumDes adalah terlahir sebagai kempuan perekonomian yang baru di area pedesaan. BumDes juga merupakan salah satu tempat usaha desa yang memiliki sifat swakelola, kebersamaan dan gotong royong antar PemDes dan warga dalam usaha meningkatkan sektor ekonomi masyarakat desa.

Sebagai roda penggerak dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat desa adalah Pemerintah desa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dengan menggerakkan SDM di desa untuk mengembangkan BumDes berkinerja baik dan akuntabel. BumDes muncul dalam bentuk tempat yang menggerakkan potensi ekonomi lokal dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga dan pendapatan. Tugas utama pemdes dan warga digerakkan secara maksimal dalam mengembangkan peningkatan pendapatan lokal bagi kesejahteraan warga desa.

Responsifitas pemerintah desa untuk menetapkan BumDes dalam kegiatan unggulan untuk meningkatkan desa dan kesejahteraan warga. Berdasarkan, Undang Uundang No.6 tahun 2014 menjelaskan tentang peningkatan sektoe Desa sebagaI subjek pembangunan secara EmanSipatoris untuk memenuhi pelayanan awal kepada masyarakat. Ini di memanfaatkan keberadaan aset-aset pendapatan lokal. Kemudian dengan keberadaannya BumDes dalam pemeran munculnya sentral-sentral pendapatan desa dengan semangat perekonomian gotong-royong.

BumDes adalah bentuk umum dan kerjasama komunitas atau kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat lokal. BUMDes adalah kegiatan kelompok warga yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan desa dan individualnya.

PKDSP (2007) mengatakan Bahwa dalam konteks pembangunan, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan program BUMDes dalam pembangunan desa dan masyarakat harus dipahami untuk tidak sekedar melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan, melainkan masyarakat harus mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kearifan lokal dan mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan desa, serta meyakinkan masyarakat desa bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan arah pembangunan kedepannya guna memperbaiki mutu dan pencapaian kesejahteraan hidupnya.

Pembangunan Desa merupakan desa sebagai tujuan pembangunan usaha untuk meminimalisir berbagai permasalahan ekonomi daerah lebih dicapai. Adapun dalam batasan Otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber pendapatan dan keuangan Desa dalam rangka mengembangkan pertumbuhan pendapatan Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

PemDes dipimpin oleh KepDes sebagai Eksekutif dan legislatif dipimpin Oleh BPD. Pemdes yang merangkul warga dan mengelola kepentingan lembaga di dalam pemerintahan, dan perkembangan. Adapun yang sebenarnya desa memiliki anggaran dana desa (ADD) yang bersumber APBD Kabupaten. tetapi dibutuhkan lembaga yang mengatur pendapatan di desa untuk menjadi kesetaraan modal pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya BUMDes, maka didirikanlah BumDes semua dananya yang pendapatan

desa, seperti Industri yang berkaitan dengan masyarakat, perkebunan, perdagangan, Pertanian, pariwisata, Tambangan, dll.

Hal ini bermaksud dan tujuannya agar peningkatan BumDes dapat memberikan manfaat juga sumbangan yang bermanfaat dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Selain tujuannya adalah supaya berkembangnya suatu model usaha berbasis modal di lingkungan desa yang berdampak dengan terganggunya norma-norma kehidupan bersosialisasi antar warga. Stimulus yang diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan roda pendapatan di desa agar pengembangan pendapatan dikelola seluruhnya oleh warga.

Agar pendapatan desa tidak dikuasai oleh kelompok orang tertentu yang pemilik stakeholder di pedesaan. Maka kepengurusan dan manajemen lembaga tersebut oleh pemdes dan dikendalikan secara kolektif dimana prioritas targetnya untuk menambah skala hidup pendapatan masyarakat. BumDes dalam aktivitasnya sehari-hari disangga oleh institusi moneter tingkat desa (unit finansial) sebagai unit yang melakukan sirkulasi berupa kredit maupun simpanan. Tujuan terakhir Badan Usaha Milik Desa juga sebagai tolak ukur andil sosial yang diharapkan yang diharapkan bermanfaat menghubungkan kekuatan pendapatan di desa.

Agar terwujudnya Badan Usaha Milik Desa yang kekurangan modal usaha diperlukan kerjasama swasta atau NGO. Secara menyeluruh, NGO merupakan Badan usaha yang berfungsi dan berperan sebagai macam bentuk BUMS. Tujuan badan usaha milik swasta bertujuan untuk mencari keuntungan sebaik mungkin untuk meningkatkan modal serta usahanya dalam membuat peluang kerja. Menurut Undang-Undang Dasar Thn. 1945

psl 33 tentang NGO menjelaskan di bagian-bagian usaha yang diberi pada NGO adalah mengelolah pendapatan yang bersifat tidak urgent dan nyangkut hajat hidup orang banyak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Swasta dalam pengelolaan BUMDes ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Dari Rumusan Masalah yang ada, peneliti bertujuan untuk meneliti sbb:

1. Untuk Mengetahui implementasi kerjasama pemerintah dalam mengembangkan BUMDes.
2. Untuk mengetahui strategi kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengembangkan BUMDes.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Di harapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan sebagian proses observsi dengan memecahkan masalah dilapangan dan juga menambakan informasih dan strategi mengelola BUMDes dengan kerjasama swasta.

2. Manfaat Praktisi

Meningkatkan pengetahuan penulis dalam memahami strategi mengelola bumdes dengan kerjasam swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Kewirausahaan, UMS*
- Aksa, Sahrul. 2014. *BUM Desa Dan Kultur Jaringan Di Bantaeng. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*, Buku. Edisi 12. Jakarta
- Dewi, Yuni S.R & Meirinawati. 2013. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun*
- Liza, Yaya S. dkk. 2019. *Implementasi Kemitraan Pihak Ke Tiga Oleh Bumdes Ekang Anculai*. Program Studi Ilmu Pemerintahan.